**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Tatanan dunia internasional saat ini membuat negara-negara di dunia lebih berorientasi pada pola-pola kooperatif. Perkembangan fenomena ini pun telah memasuki aspek-aspek baru, dimana Hubungan Internasional tidak hanya mengkaji tentang negara namun juga peran aktor non-negara yang bisa melakukan kerjasama. Kerjasama ini kemudian membentuk pola-pola hubungan yang mutual *gains,* yakni hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain (hubungan interdepedensia). Implikasi dari adanya pola-pola hubungan kooperatif antara negara di dunia membuat isu-isu hubungan internasional semakin berkembang, memunculkan hubungan internasional kontemporer.

Hubungan Internasional kontemporer dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial dimana menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian yang mengitari interaksi tersebut.[[1]](#footnote-1) Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara tetapi juga dengan subjek lain seperti interdependesia ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, ketimpangan gender, keterbelakangan, dan lain-lain.[[2]](#footnote-2)

Adapun konsekuensi nyata dari pola hubungan kooperatif adalah munculnya komitmen-komitmen organisasi internasional dalam melakukan perbaikan taraf hidup dan pembangunan atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan bagi seluruh umat manusia agar memiliki hak-hak dasar hidup yang sejajar dengan manusia lainnya. Salah satu aktor dalam hubungan internasional yang berperan melakukan kerjasama dalam hal ini adalah *United State Agency for International Development* (USAID).

USAID merupakan sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang diresmikan oleh John F. Kennedy sebagai bagian dari Undang-Undang tentang bantuan luar negeri Amerika tahun 1961. USAID menjadi lembaga bantuan asing Amerika Serikat pertama, yang penekanan utamanya terhadap upaya pembagunan ekonomi.[[3]](#footnote-3) Dan di tahun 2000-an USAID fokus untuk membangun pemerintahan, infrastruktur, masyarakat sipil dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.[[4]](#footnote-4)

Sedangkan di Indonesia sendiri, USAID pertama kali menjalankan misinya pada akhir tahun 1961 untuk membantu pemerintah mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. USAID juga beberapa kali memberikan bantuan kemanusiaan untuk Indonesia seperti saat terjadinya Tsunami di Aceh dan gempa di wilayah Jawa Tengah. Dan pada tahun 2010 kerjasama USAID dan Indonesia diwujudkan kembali melalui kerjasama Amerika dan Indonesia dalam suatu kemitraan komperehensif (*Compherenship Partnership*) yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam kerangka kerjasama kemitraan strategis tersebut kedua belah pihak menyetujui untuk memperdalam dan memperluas kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan setara di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.[[5]](#footnote-5)

Kemudian kerjasama kemitraan komperehensif Amerika dan Indonesia diwujudkan dalam sebuah dokumen Strategi Kerjasama (*Country Partnership Strategy*). Dokumen Strategi Kerjasama tersebut mengandung tujuan penyaluran bantuan dan prinsip arahan (*guide principal*) yang menjadi acuan dalam menentukan fokus dan prioritas bantuan dari mitra strategis/komprehensif. Dokumen Starategi Kerjasama tersebut mengandung cakupan program, cakupan geografis, dan periode bantuan yang diturunkan dari strategi kerjasama kemitraan stategis/komprehensif.[[6]](#footnote-6) Indonesia sendiri telah menyusun dokumen Stategi Kerjasama dengan Amerika yaitu Strategi Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat tahun 2009-2014.[[7]](#footnote-7)

Strategi Kerjasama tersebut memberikan gambaran akan arah dan pendekatan baru dalam bermitra. Strategi baru ini memanfaatkan sumber daya Amerika dan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dan membangun bangsa yang makmur dan inklusif. Dalam pelaksanaannya Amerika sendiri telah menyalurkan bantuannya melalui USAID (*executing agency*), yakni senilai Rp 9,3 Triliun atau 1 milliar dollar AS.[[8]](#footnote-8) Berikut merupakan area prioritas kerjasama pembangunan Amerika melalui USAID dan Indonesia tahun 2010-2014:[[9]](#footnote-9)

1. Politik dan Keamanan
2. Pemerintahan Demokrastis (Penguatan hukum perundangan, dan pengefektifan tata pemerintahan).
3. Ekonomi dan Pembangunan
4. Lapangan Pekerjaan (Kebijakan ekonomi untuk mendorong lapangan pekerjaan, modal investasi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan produksi tanaman terpilih).
5. Sosial Budaya, Kerjasama Teknologi, Pendidikan, dan Ilmu pengetahuan
6. Kualitas Pendidikan (Pendidikan Dasar dan Tinggi).
7. Pengelolaan SDA (Pengelolaan ekosistem hutan dan laut, air minum, dan energi).
8. Peningkatan Status Kesehatan (menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi dan anak).

Salah satu bentuk kerjasama Amerika dan pemerintah Indonesia melalui USAID adalah di bidang pendidikan, sebagai salah satu perwujudan dari ketiga pilar kerjasama Amerika dan Indonesia. Hal ini tak terlepas dari kondisi pendidikan Indonesia yang saat ini sedang mengalami masalah yang demikian rumit. Berdasarkan data UNESCO, *Human Development Index* (HDI) negara Indonesia berada pada urutan ke-112 diantara 174 negara yang diteliti, sedangkan *The Political and Economics Risk Consultancy* (PERC) yang berpusat di Hongkong meletakkan sistem pendidikan di Indonesia pada urutan ke-12 diantara 12 negara yang diteliti.[[10]](#footnote-10)

 Kemudian data memprihatinkan lainya diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies R. Baswedan, PhD dalam acara Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas[[11]](#footnote-11) diungkapkan bahwa:

1. 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Data tersebut didapat dari pemetaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap 400.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2012;
2. Nilai rata-rata ujian kompetisi guru pada tahun 2012 di Indonesia hanya mencapai 44,5 dari yang diharapakan pemerintah sebesar 70;
3. Pada tahun 2013 dan 2014 Indonesia menempati posisi ke- 40 dari 40 negara pada pemetaan *The Learning Cuve-Pearson*;
4. Pada tahun 2013 peringkat Indonesia dalam pemetaan perguruan tinggi hanya menmpati posisi ke 49 dari 50 negara yang dipetakan oleh Universitas21;
5. Pada tahun 2011 dalam pemetaan bidang literasi sains yang dilakukan oleh *Trends in International Mathematics and Science Studies*, Indonesia hanya menempati posisi ke-40 dari 42 negara;
6. Indonesia hanya menempati posisi ke 64 dari 65 negara yang diikutsertakan dalam pemetaan PISA pad tahu 2012; dan
7. Hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang punya minat baca serius.

Permasalahan pendidikan di Indonesia tersebut sebenarnya tak terlepas dari jumlah anggaran yang diperuntukan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2002, Indonesia memberlakukan batas bawah belanja pendidikan sebesar minimal 20% dari keseluruhan belanja publik, namun hal tersebut sering kali tidak tercapai. Porsi tersebut baru bisa mencapai sekitar 15% pada tahun 2011. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia pada akhirnya mempengaruhi kualitas *output* yang dikeluarkanya, yakni sumber daya manusia/tenaga kerja.

Mengacu pada kondisi tersebut, USAID dan Pemerintah Indonesia sampai pada suatu kesepakatan kerjasama dalam menuntaskan permasalahan pendidikan dengan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut juga didasari oleh visi dan misi yang dimiliki oleh USAID sebagai salah satu lembaga yang fokus terhadap permasalahan pendidikan. Maka pada tanggal 3 November 2012, USAID dan Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan program PRIORITAS (*Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrator and Student)*.

PRIORITAS sendiri merupakan program lima tahun yang dibentuk untuk membantu menyediakan akses ke pendidikan berkelas dunia untuk siswa Indonesia di sekolah/madrasah tingkat dasar dan menengah pertama.[[12]](#footnote-12) Program ini menggunakan pedekatan ‘pengembangan secara menyeluruh’ yang melibatkan seluruh aspek pendidikan guna mendukung pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan, anggaran, pengembangan kebijakan; meningkatkan hubungan antar sekolah, kabupaten/kota, provinsi, LPTK, dan pemerintah pusat; serta meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola pendidikan. Dalam pelaksanaannya program ini juga bekerjasama dengan mitra lokal dari kabupaten, universitas, dan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sedangkan untuk fokus programnya sendiri, USAID PRIORITAS berfokus pada peningkatan:[[13]](#footnote-13)

1. Pendidikan guru pra- dan dalam jabatan di LPTK melalui program yang menekankan praktik.
2. Pembelajaran aktif di SD/MI, SMP/MTs menjadi lebih menarik, relevan dan efektif dengan penekanan kepada membaca, matematika dan *sains*.
3. Manajemen sekolah menjadi partisipatif, akuntabel, transparan, dan terfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.
4. Manajemen pendidikan di daerah, khusus dalam hal penempatan guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan pembiayaan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran USAID dalam membantu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengangkat judul **“Kerjasama USAID (*United States Agency for International Development)* dan Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia”**.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama USAID dan Indonesia dalam bidang pendidikan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama USAID dan Indonesia dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi program USAID dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia?
	1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi di seputar masalah penelitian sedangkan kemampuan peneliti dalam pencarian data pada keterbatasannya, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program PRIORITAS pada tahun 2015-2016.

* 1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan analisa mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

**“Bagaimana implementasi program PRIORITAS dalam kerjasama USAID (*United States Agency for International Development)* dan Indonesia bagi peningkatan kualitas pendidikan?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerjasama USAID dan Indonesia dalam bidang pendidikan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama USAID dan Indonesia dalam meningktkan pendidikan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi program USAID dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia.

### Kegunaan Penelitian

* 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan melatih cara berpikir, memahami serta mengamati mengenai realitas hubungan internasional khususnya mengenai masalah yang diteliti.
	2. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan pembanding bagi studi-studi lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait yang dibahas, dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai literatur tambahan dalam mempelajari dan menganalisa masalah-masalah hubungan internasional.
	3. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
2. **Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah proses penelitian ini, diperlukan landasan dalam memperkuat analisa mengenai peran kerjasama USAID (*United States Agency for International Development)* dan Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Pendidikan di Indonesia. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema peneliti ini, adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu dalam memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian. Kriteria utama suatu kerangka pemikiran adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis, hal ini berarti bahwa dalam menghadapi permasalahan yang diajukan maka digunakan teori-teori ilmiah sebagai pisau analisis yang membantu dalam pemecahan masalah.

Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa interaksi yang dilakukan individu atau kelompok yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara (hubungan antara satu negara dengan negara lain) atau semua interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa dapat dikatakan sebagai “Hubungan Internasional”. Pada dasarnya, hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain. Hubungan Internasional menurut **K.J Holsti** adalah: “Sebuah bentuk interaksi dalam berbagai aspek internasional yang melewati batas negara antar anggota masyarakat yang berbeda, baik yang didukung dan bertindak atas nama pemerintah atau tidak”.

Konsep lain mengenai Hubungan Internasional yakni pendapat dari **Trigive Mathisen**, yang menyebutkan bahwa:

**“Hubungan Internasional merupakan suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari berbagi cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dalam politik internasional dan merupakan sebuah aspek internasional dari kehidupan sosial dalam arti tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.”**[[14]](#footnote-14)

Hubungan Internasional semakin berkembang menjadi disiplin ilmu yang semakin hari semakin luas. Menurut **Suwardi Wiraatmadja** dalam pengantar hubungan internasional mengatakan bahwa: “Hubungan Internasional lebih semacam hubungan antar bangsa dan masyarakat dunia dan kekuatan menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia”[[15]](#footnote-15)

Pengertian Hubungan Internasional di atas menjelaskan secara umum tentang ruang lingkupnya yang luas, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa studi Hubungan Internasional menyangkut seluruh aspek sosial masyrakat internasional, maka tidak mengherankan kalau ada yang berpendapat bahwa hubungan internasional dapat diidentifikasi dengan totalitas interaksi kepentingan masing-masing negara yang disalurkan dalam politik luar negeri masing-masing negara tersebut.

Politik luar negeri juga merupakan salah satu kajian studi hubungan internasional. Politik luar negeri pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.[[16]](#footnote-16) Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.[[17]](#footnote-17) Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.[[18]](#footnote-18)

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[[19]](#footnote-19) Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.[[20]](#footnote-20) Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama. Menurut **Teuku May Rudy**:

**“Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (compettition), dan pertentangan (conflict). Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerjasama.”[[21]](#footnote-21)**

Kerjasama Internasional juga merupakan salah satu ruang lingkup dari hubungan internasional, yang memiliki makna sebagai suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional. Setiap negara memiliki motivasi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanlah hubungan, interaksi serta kerjasama dengan negara lain. Oleh karenanya, hakekatnya kerjasama antara negara satu dengan yang lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional yang sulit rasanya untuk memenuhinya dengan kemampuan sendiri.

*Pertama,* menurut **Koesnadi Kertasasmita** yang dimaksud dengan kerjasama internasional, yaitu:

**“Kerjasama Internasional terjadi karena *‘nation understanding’* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internsaional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.”[[22]](#footnote-22)**

*Kedua,* konsep kerjasama internasional lainnya dapat dipahami melalui teori yang dikemukakan oleh **Kalevi Jaakko Holsti**, sebagai berikut:[[23]](#footnote-23) (1) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak; (2) Persetujuan atas masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan; (3) Pandangan atau harapan suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; (4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; (5) Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

*Ketiga,* Kerjasama Internasional menurut **James Edward Dougherty** dan **Robert L. Pfaltzgraff** yaitu:

**“Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Kerjasama dapat muncul akibat adanya komitmen individu dan Negara untuk mendapatkan kesejahteraan kolektif.”[[24]](#footnote-24)**

Dewasa ini kerjasama internasional tidak cukup hanya dilakukan melalui hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral saja. Tetapi kerjasama internasional juga dapat diwujudkn dengan cara lain dengan melembagakannya, yaitu membentuk atau mendirikan organisasi internasional.[[25]](#footnote-25) Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional.

Menurut **Le Roy A. Bannet**, organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional.[[26]](#footnote-26) Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya.

Sedangkan menurut **Clive Archer** dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. *Pertama*, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. *Kedua*, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan intergovernmental yang disebut dengan hubungan *transnational.* *Ketiga*, hubungan antar suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelejennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.[[27]](#footnote-27)

Sedangkan Konsep Organisasi Internasional menurut **Teuku May Rudy** dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional menyatakan bahwa:

**“Organisasi Internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batasbatas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda.”[[28]](#footnote-28)**

Kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Menurut **Clive Archer**, peranan Organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu :[[29]](#footnote-29)

1. Sebagai suatu instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negaranya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah negerinya., ataupun masalah dalam negeri dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Organisasi internasional sebagai suatu instrumen, dipakai oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (*Inter-Governmental Organization*) dimana anggota-anggotanya merupakan negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Maksudnya bahwa organisasi internasional tidak lebih dari instrumen dari kebijakan pemerintah, sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai negara-negara berdaulat. Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk institusional untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional.

Adapun organisasi internasional yang bersifat fungsional tentunya memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional menurut **A. Leo Roy Bannet** adalah:[[30]](#footnote-30)

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul kepermukaan.

Menurut **Teuku May Rudy**, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator yang digunakan. Berikut ini penggolongan suatu organisasi internasional:[[31]](#footnote-31)

1. Kegiatan administrasi
2. Kegiatan Internasional Antar-Pemerintah (*intergovernmental organization*) yang disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah, atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum publik.
3. Organisasi internasional non-pemerintah (*non-governmental organization*) yang disingkat NGO atau INGO (*international nongovernmental organization*), untuk membedakannya antara NGO yang yang internasional dan NGO yang ruang lingkupnya *domestic* (terdapat dalam suatu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.
4. Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan
5. Organisasi Internasional Global. Wilayah kegiatannya adalah global dan merupakan keanggotaan yang terbuka dan ruang lingkup diseluruh dunia.
6. Organisasi Internasional Regional. Wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaannya hanya diberikan pada kawasan-kawasan tertentu saja.
	* 1. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi

Untuk hal ini, pembagiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang atau salah satu aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya :

1. Bidang Ekonomi,
2. Bidang Lingkungan Hidup,
3. Bidang Kesehatan.
	* 1. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi
4. Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu.
5. Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus). Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja.
6. Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan
	1. Organisasi Internasional : Global-Umum
	2. Organisasi Internasional : Global-Khusus
	3. Organisasi Internasional : Regional-Umum
	4. Organisasi Internasional : Regional-Khusus
7. Menurut Taraf Kewenangannya
8. Organisasi Supra-Nasional (*Supra-National Organization*) Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada diatas negara-negara anggota. Tidak ada contohnya, karena bentuk *“supranational organization”* belum pernah tercapai atau belum terealisasikan dalam sejarah dunia modern. Dunia menganut pola banyak negara (*multy-state system*) masing-masing berdaulat.
9. Organisasi dan Sederajat Satu Sama Lain

Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya. Contoh, seperti PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak), dan sebagainya. Karena semua organisasi internasional dewasa ini adalah berdasarkan kepada pola kerjaama, bukan supra-nasional.

Berdasarkan beberapa teori yang diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa USAID (*United State Agency For Internasional Development*) sebagai organisasi internasional yang berdasarkan penggolangannya, penulis menggolongkan USAID sebagai salah satu bentuk IGO (*Inter-Governmental* Organization), karena USAID merupakan suatu organisasi perwakilan Amerika Serikat dalam menyalurkan bantuan kepada negara-negara berkembang diseluruh dunia berdasarkan hubungan bilateral yang dijalin dengan negara lain di dunia dalam rangka mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi.

Adapun USAID mulai diresmikan pada tahun 1961 oleh John F. Kennedy sebagai bagian dari Undang-Undang tentang bantuan luar negeri Amerika. USAID juga memiliki struktur lembaga yang jelas yaitu dikepalai oleh seorang Administator dan Deputi Administator, dimana keduanya diangkat oleh presiden dan selanjutnya dikonfirmasi dan disahkan oleh Senat. Selain itu USAID juga memiliki biro geografis (yang bertanggung jawab terhadap semua aktifitas di negara tempat program tersebut dijalankan) dan biro fungsional (yang bertugas menjalankan program USAID yang ada diseluruh dunia ataupun yang melintasi batas geografis). Sedangkan markas besar USAID disebut biro atau kantor yang berada di Washington D.C dan juga memiliki kantor perwakilan di tiap-tiap negara yang memang melakukan kerjasama dengan USAID.

Berdasarkan taraf kewenangannya, penulis menggolongkan USAID sebagai organisasi kerjasama yang terlaksana karena adanya kerjasama antar pemerintah Amerika dengan negara-negara lain didunia. Sedangkan berdasarkan fungsi organisasinya, penulis menggolongkan USAID sebagai organisasi politik karena USAID merupakan bentuk perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri Amerika dalam melaksanakan kerjasama dengan negara-negara penerima bantuan. Selain itu, sebagai institusi atau organisasi yang didirikan oleh pemerintah Amerika, maka USAID menjadi instrumen dari kebijakan pemerintah Amerika. USAID pun kemudian dijadikan sebagai alat diplomasi dan perantara oleh Amerika untuk berinteraksi dengan negara-negara berdaulat lainnya. Biasanya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak USAID mendapatkan pengaruh dari kebijakan luar negeri Amerika itu sendiri, sehingga setiap tindakan yang dilakukan khususnya pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang, memberikan dampak baik bagi kepentingan nasional Amerika dan mampu menjaga citra baik Amerika. Dengan pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara, sampai saat ini USAID sudah ada di lebih 100 negara berkembang didunia untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, demokrasi, dan kemajuan manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bekerjasama dengan USAID. Dalam rangka peningkatan hubungan bilateral antara Amerika dengan Indonesia, maka USAID dijadikan wadah kerjasama kedua negara. USAID pertama kali menjalankan misinya di Indonesia pada akhir tahun 1961 untuk membantu pemerintah mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. Sejak saaat itu USAID konsisten membantu Indonesia dalam menyelesaikan berbagai masalah negara Indonesia. Kemudian pada tahun 2010 kerjasama USAID dan Indonesia kembali diwujudkan melalui kemitraan komperehensif (*Compherenship Partnership*) yang ditandangani Presiden Obama dan Yudhoyono. Didalam kerangka kerjasama kemitraan tersebut kedua belah pihak menyetujui untuk memperdalam dan memperluas kerjasama bilateral dan saling menguntungkan dan setara di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.[[32]](#footnote-32)

Salah satu bidang yang menjadi area prioritas kerjasama Amerika melalui USAID dengan Indonesia yaitu pendidikan. Hal itu tak terlepas dari kondisi pendidikan Indonesia yang saat ini memprihatinkan. Berdasarkan data UNESCO, *Human Development Index* (HDI) negara Indonesia berada pada urutan ke-112 diantara 174 negara yang diteliti, sedangkan *The Political and Economics Risk Consultancy* (PERC) yang berpusat di Hongkong meletakkan sistem pendidikan di Indonesia pada urutan ke-12 diantara 12 negara yang diteliti.[[33]](#footnote-33)

Kemudian data memprihatinkan lainya diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies R. Baswedan, PhD dalam acara Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas[[34]](#footnote-34) diungkapkan bahwa:

1. 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Data tersebut didapat dari pemetaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap 400.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2012;
2. Nilai rata-rata ujian kompetisi guru pada tahun 2012 di Indonesia hanya mencapai 44,5 dari yang diharapakan pemerintah sebesar 70;
3. Pada tahun 2013 dan 2014 Indonesia menempati posisi ke- 40 dari 40 negara pada pemetaan *The Learning Cuve-Pearson*;
4. Pada tahun 2013 peringkat Indonesia dalam pemetaan perguruan tinggi hanya menmpati posisi ke 49 dari 50 negara yang dipetakan oleh Universitas21;
5. Pada tahun 2011 dalam pemetaan bidang literasi sains yang dilakukan oleh *Trends in International Mathematics and Science Studies*, Indonesia hanya menempati posisi ke-40 dari 42 negara;
6. Indonesia hanya menempati posisi ke 64 dari 65 negara yang diikutsertakan dalam pemetaan PISA pad tahu 2012; dan
7. Hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang punya minat baca serius.

Saat ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah antara lain yaitu dengan memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perubahan Kurikulum Berdasarkan Kompetensi (KBK) yang diberlakukan secara serentak pada semua jenjang sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) tahun ajaran 2004 dan dimantapkan lagi pada 2 Juni Tahun 2006 (melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah) yang dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan langkah kongkrit dalam rangka memenuhi tuntutan pembaharuan pendidikan nasional. KTSP yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2006 tidak jauh berbeda nasibnya dengan KBK. Kurikulum KTSP yang dianggap sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya (KBK) ini memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah (lembaga tingkat satuan pendidikan) untuk pengembangannya. Guru dan sekolah diberikan kebebasan untuk berkreasi dengan berpatokan pada standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.[[35]](#footnote-35)

Akan tetapi, hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara KBK dan KTSP. Keduanya sama-sama merupakan seperangkat rencana pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan hasil belajar peserta didik. Perbedaannya nampak pada teknis pelaksanaan. Jika KBK disusun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas, KTSP disusun oleh tingkat satuan pendidikan masing-masing, dalam hal ini sekolah yang bersangkutan, walaupun masih tetap mengacu pada rambu-rambu nasional Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh badan independen yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).[[36]](#footnote-36)

Indonesia sendiri telah melaksanakan berbagai reformasi pendidikan selama dua dasawarsa terakhir, dengan berbagai inovasi yang signifikan dalam kebijakan dan praktik organisasi serta praktik pedagogis, dan berbagai reformasi tersebut telah membuahkan hasil yang positif. Meskipun hasil pendidikannya cenderung masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain di dalam dan di luar kawasan, sesuai dengan tingkat PDB per kapitanya, Indonesia memiliki kinerja yang cukup baik. Sebagai contoh, meskipun Indonesia menduduki peringkat kedua paling rendah di antara sejumlah negara yang berpartisipasi dalam PISA 2012, namun kinerja Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapitanya: hasil PISA Indonesia setara dengan Peru dan Brasil, di mana kedua negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi (Gambar 1.1, Panel A). Demikian pula halnya, keikutsertaan dan pencapaian dalam pendidikan tinggi masih cukup rendah, namun apabila dibandingkan dengan pendapatan per kapita (Panel B), tingkatnya tergolong tidak rendah. Selain itu, selama beberapa dasawarsa terakhir sebagian besar indikator kinerja pendidikan telah meningkat secara mantap: keikutsertaan dalam pendidikan tinggi mencapai 3% pada tahun 1970, 9% pada tahun 1990, dan 27% pada tahun 2011. Hasil berdasarkan gender juga relatif setara.[[37]](#footnote-37)

Tabel Grafik 1.1 Panel A dan B, Belanja di Sektor Pendidikan 2012 dan Skor PISA versus PDB Perkapita



Permasalahan pendidikan di Indonesia tersebut sebenarnya tak terlepas dari jumlah anggaran yang diperuntukan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2002, Indonesia memberlakukan batas bawah belanja pendidikan sebesar minimal 20% dari keseluruhan belanja publik, namun hal tersebut sering kali tidak tercapai. Porsi tersebut baru bisa mencapai sekitar 15% pada tahun 2011. Selain itu, berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan keterkaitan antara model dan mutu kepemimpinan lokal dengan kinerja pendidikan, hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan dan kualitas pengajar juga mempengaruhi kualitas pendidikan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia pada akhirnya mempengaruhi kualitas *output* yang dikeluarkanya, yakni sumber daya manusia/tenaga kerja. Berdasarkan data Kemenakertrans per Agustus 2012, dari 118,05 juta tenaga kerja yang terdaftar, 82,10 juta merupakan lulusan sekolah dasar, 38,57 juta lulusan sekolah menengah pertama, mengikuti 27,65 juta lulusan sekolah menengah atas, dan 13,54 lulusan sekolah menengah kejuruan. Hanya 3,87 juta lulusan diploma dan 8,17 juta sarjana[[38]](#footnote-38).

Didasari dengan visi dan misi yang dimiliki USAID sebagai salah satu lembaga yang fokus terhadap permasalahan pendidikan, maka USAID dan Pemerintah Indonesia sampai pada suatu kesepakatan kerjasama untuk meningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kemudian dibentuklah program PRIORITAS (*Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrator and Student*), yakni program lima tahun buatan USAID untuk membantu menyediakan akses kependidikan berkelas dunia bagi siswa Indonesia di sekolah/madrasah tingkat dasar dan menengah pertama.[[39]](#footnote-39) Program ini resmi diluncurkan pada 3 November 2012 oleh USAID dan Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program ini menggunakan pedekatan ‘pengembangan secara menyeluruh’ yang melibatkan seluruh aspek pendidikan guna mendukung pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan, anggaran, pengembangan kebijakan; meningkatkan hubungan antar sekolah, kabupaten/kota, provinsi, LPTK, dan pemerintah pusat; serta meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola pendidikan. Dalam pelaksanaannya program ini juga bekerjasama dengan mitra lokal dari kabupaten, universitas, dan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sedangkan untuk fokus programnya sendiri, USAID PRIORITAS berfokus pada peningkatan:[[40]](#footnote-40)

1. Pendidikan guru pra- dan dalam jabatan di LPTK melalui program yang menekankan praktik.
2. Pembelajaran aktif di SD/MI, SMP/MTs menjadi lebih menarik, relevan dan efektif dengan penekanan kepada membaca, matematika dan *sains*.
3. Manajemen sekolah menjadi partisipatif, akuntabel, transparan, dan terfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.
4. Manajemen pendidikan di daerah, khusus dalam hal penempatan guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan pembiayaan pendidikan.
5. **Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah yang akan kita teliti dimana merupakan penjelasan yang bersifat sementara yang perlu diteliti lagi kebenarannya secara empiris. Berdasarkan hal tersbeut, peneliti membuat hipotesis: **“Implementasi program PRIORITAS (*Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrator and Student*) akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia meliputi: Peningkatan kualitas kurikulum, kualitas manajemen dan tata kelola, anggaran pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.”.**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel bebas:Implementasi program PRIORITAS (*Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrator and Student*) | 1. Program USAID PRIORITAS Diresmikan.
2. Program USAID PRIORITAS bekerjasama dengan tingkat nasional dan lokal.
3. Program Penataan dan Pemerataan Guru.
4. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
5. Program Buku Bacaan Berjenjang.
 | 1. Program USAID PRIORITAS diresmikan pada 3 Oktober 2012 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. DR. Muhammad Nuh, DEA di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. (Sumber: <http://www.prioritaspendidikan.org/file/KABAR_PRIORITAS_-_Sumatra_Utara.pdf>)
2. USAID PRIORITAS hingga saat ini bekerja di 89 daerah mitra di Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Daerah mitra terbagi atas 46 daerah DBE yang berfokus pada diseminasi praktik yang baik, 23 daerah PRIORITAS kohor 1 dan 20 daerah mitra PRIORITAS kohor 2. Pada akhir tahun 2013, daerah mitra diperluas ke Provinsi Papua. (Sumber: Laporan Akhir Program USAID PRIORITAS Kab. Madiun 2016)
3. Penataan dan pemerataan guru merupakan kebijakan yang positif, karena dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan secara merata. Tahapan pendampingan PPG pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: 1) Sosialisasi, 2) Whorkshop Analisis Data, 3) Whorkshop Analisis Kebijakan, 4) Konsultasi Publik. (Sumber: Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru)
4. USAID PRIORITAS membantu penerapan program PKB, melalui perencanaan untuk diseminasi program pelatihan dan pendampingan guru, berbasis gugus dan *Whole-School Development*, yang terbukti menjadi praktik terbaik dalam PKB. (Sumber: Perencanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)
5. Salah satu fokus USAID PRIORITAS dan Pemerintah Indonesia saat ini adalah pengembangan membaca, namun kurangnya buku untuk anak kelas pemula menjadi masalah besar di tanah air, karena USAID PRIORITAS dan YLAI bekerjasama mengembangkan buku bacaan berjenjang khusus siswa kelas pemula/awal (Sumber: <http://literasi.org/berita-kegiatan/buku-berjenjang-tingkatkan-kemampuan-baca-anak-selengkapnya/>)
 |
| Variabel Terikat:mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia meliputi: Peningkatan kualitas kurikulum, kualitas manajemen dan tata kelola, anggaran pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan | 1. Peningkatan kualitas kurikulum.
2. Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola.
3. Peningkatan anggaran pendidikan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 | * 1. Laporan hasil pencapaian tahun 2015, proporsi guru kelas pemula yang menggunakan metode praktik yang baik dalam pembelajaran telah meningkat dari 15,5% pada tahun 2013 menjadi 77,6% pada tahun 2015. Sedangkan kenaikan proporsi pengelola sekolah mulai menciptakan budaya membaca telah meningkat dari 42,1% pada tahun 2013 menjadi 87,6% pada tahun 2015. Lalu persentase siswa yang memperlihatkan perilaku positif dalam belajar meningkat dari 22.7% menjadi 80.8%.
	2. Hasil pencapaian program PPG diantaranya; ada 624 sekolah yang digabungkan dan menghasilkan 305 sekolah, dengan tujuan efisiensi dalam pemerataan guru. Beberapa guru dari 94 SMP diangkat tahun ini sebagai guru gesit (aktif), ditugaskan untuk lebih dari satu sekolah, total 1.361 guru aktif (termasuk 532 guru SD), dan sementara 612 guru telah ditunjuk sebagai guru tetap, dan sebanyak 6,345 guru baru direkrut.
	3. Alokasi dana untuk implementasi program bersumber dari pemerintah dan kontribusi daerah serta dana hibah USAID.
	4. Penguatan intruksi sekolah melalui pendekatan *Whole-School Development* (WSD). USAID melaksanakan program pendidikan inklusif dan kesetaraan gender. USAID mengeluarkan sekitar 75 judul buku bacaan berjenjang, secara resmi menyerahkan 8 juta buku ke 12.000 sekolah.
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**AMERIKA SERIKAT**

**Pemerintah Indonesia**

**USAID (*United States Agency for International Development)***

**KERJASAMA**

**Fokus program, meningkatkan:**

1. **Pendidikan guru pra- dan dalam jabatan di LPTK melalui program yang menekankan praktik.**
2. **Pembelajaran aktif di SD/MI, SMP/MTs menjadi lebih menarik, relevan dan efektif dengan penekanan kepada membaca, matematika dan *sains*.**
3. **Manajemen sekolah menjadi partisipatif, akuntabel, transparan, dan terfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.**
4. **Manajemen pendidikan di daerah, khusus dalam hal penempatan guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan pembiayaan pendidikan**.

**PENDIDIKAN**

**USAID PRIORITAS (*Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrator and Student*)**

**INDONESIA**

**Kualitas Pendidikan di Indonesia Meningkat**

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan, maka harus melakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi untuk memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisa yang penulis gunakan, yaitu analisa korelasionis dimana unit eksplanasi dan unit analisisnya pada tingkatan yang sama, dimana kerjasama Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat melalui USAID (*United States Agency for International Development*), analisisnya ditingkat yang sama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.

### Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada dan sedang berlangsung, untuk menghasilkan analisis mengenai pengaruh kerjasama USAID dengan Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan *(Library Research)*, yaitu teknik mengumpulkan data berdasarkan penelahaan/penelusuran literatur. Pada penelitian ini, penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip, artikel, online research di internet dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi pada peneliti ini.

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa perpustkaan dan instansi dengan tujuan dalam memperoleh data dan informasi yang akurat untuk penelitian ini, yaitu:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat 40261

### Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 dimulai dari persiapan judul proposal penelitian dan pengolahan data. Untuk lebih lengkap mengenai tahapan dari penelitian yang dilakukan tertera pada tabel berikut

 **Tabel 2**

**JADWAL KEGIATAN PENELITIAN**

**TAHUN 2016-2017**



1. **Sistematika Penulisan**

Secara umum, penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lain. Sehingga pada akhirnya membentuk satu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** **PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, dimana sub-subnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang berupa pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, operasional variabel dan indikator, skema kerangka teoritis, tingkat analisis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan jadwal kegiatan penilitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan

**BAB II KERJASAMA USAID *(UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT)* DAN PEMERINTAH INDONESIA**

Bab ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu, konsep yang menjelaskan dan memprediksi permasalahan tersebut. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Kerjasama USAID (*United States Agency for International Development)* dan Pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan.

**BAB III KONDISI PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA**

Bab ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan peristiwanya dan terjadi akibat dari variabel lain. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan disini akan dibahas tentang gambaran umum mengenai kondisi pendidikan di Indonesia.

**BAB IV ANALISIS KERJASAMA USAID DAN INDONESIA MELALUI PROGRAM PRIORITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang telah dideskripsikan dalam pengolahan data.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bab bagian akhir dari laporan penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai permasalahan yang di dalamnya.

1. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations* (Denmark: Oxford University Press, 1999), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-2)
3. “USAID History” dalam <https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history> diakses pada 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-4)
5. “Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Strategi Pengembangan Kerjasama Pembangunan Bilateral 2015-2019”, hlm. 46. Dalam <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/159384-%5B_Konten_%5D-Konten%20D1022.pdf> diakses pada 2 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., hlm. 48. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. “Bermitra Bersama menuju Kemakmuran: Strategi USAID di Indonesia 2009-2014” dalam [www.ampl.or.id/digilib/read/bermitra-bersama-menuju-kemakmuran-strategi-usaid-di-indonesia--2014/2959](http://www.ampl.or.id/digilib/read/bermitra-bersama-menuju-kemakmuran-strategi-usaid-di-indonesia--2014/2959) diakses 2 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Strategi Pengembangan Kerjasama Pembangunan Bilateral 2015-2019”, Op.Cit., hlm. 47. [↑](#footnote-ref-9)
10. Khudlaarin Avinita Kurnia Muharatun, “Evaluasi Pelaksanaan Muatan Lokal Keterampilan Di SMP Negeri 15 Yogyakarta”, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, Gawat Darurat Pendidikan Indonesia Baswedan, PHD., Anies R. 2014*. (Jakrata: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014), hlm. 12-22. dalam <http://disdik.agamkab.go.id/File/Paparan%20Menteri%20-%20Kadisdik%20141201%20-%20Low%20v.0.pdf>. diunduh pada 2 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. “USAID PRIORITAS, Tingkatkan Akses Pendidikan Dasar” dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2015/11/01/348220/usaid-prioritas-tingkatkan-akses-pendidikan-dasar> diakses pada 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. “Selamat Datang di USAID PRIORITAS” dalam <http://www.prioritaspendidikan.org/id/post/view/detail/1> diakses pada 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-13)
14. Suwardi Wiriaatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*,(Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm 36. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset: 2011), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-16)
17. James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. *World Politics: An Introduction,* (New York: The Free Press, 1976), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-17)
18. James N. Rosenau. *The Scientific Study of Foreign Policy,* (New York: The Free Press, 1980), hlm. 171, 173. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jack C. Plano dan Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*, (Bandung: Abardin, 1999), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mochtar Mas’oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 184. [↑](#footnote-ref-20)
21. Teuku May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global,* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-21)
22. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional,* (Jakarta: Rosdakarya, 1983), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-22)
23. KJ.Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Dianalisis*, Jilid II, Terjemahan M.Tahrir Azhari, (Jakarta Erlangga, 1988), hlm.652-653. [↑](#footnote-ref-23)
24. James E Dougherty & Pfaltzgraff Robert L. *Contending Theories*, (New York: Harper and Row Publisher, 1997), hlm. 418-419. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 70. [↑](#footnote-ref-25)
26. Wiwin Yulianingsih & Firdaus Sholihin. *Hukum Organisasi Internasional*. (Yogyakarta : Andi Offset, 2014), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-26)
27. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmmad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: Graha Ilmu, 2005), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-27)
28. Teuku May Rudy. *Administrasi & Organisasi Internasional, (*Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-28)
29. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochmmad Yani, Op.Cit., hlm. 95. [↑](#footnote-ref-29)
30. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmmad Yani. Ibid., hlm. 97. [↑](#footnote-ref-30)
31. T. May Rudy. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 5-9. [↑](#footnote-ref-31)
32. “Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Strategi Pengembangan Kerjasama Pembangunan Bilateral 2015-2019”, hlm. 46. Dalam <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/159384-%5B_Konten_%5D-Konten%20D1022.pdf> diakses pada 2 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-32)
33. Khudlaarin Avinita Kurnia Muharatun, “Evaluasi Pelaksanaan Muatan Lokal Keterampilan Di SMP Negeri 15 Yogyakarta”, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-33)
34. “Baswedan, PHD., Anies R.2014.*Gawat Darurat Pendidikan Indonesia*.Jakrata:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia” dalam <http://disdik.agamkab.go.id/File/Paparan%20Menteri%20-%20Kadisdik%20141201%20-%20Low%20v.0.pdf>. diunduh pada 2 Maret 2017, hlm. 12-22. [↑](#footnote-ref-34)
35. Khudlaarin Avinita Kurnia Muharatun, Op.Cit., hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid. [↑](#footnote-ref-36)
37. “*Organization for Econommic Coopration and Developement.2015. Survei Ekonomi OECD Indonesia*”, hlm. 22-23. dalam <http://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf> diunduh pada 20 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-37)
38. “Kualitas Tenaga Kerja RI Rendah” dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8161/Kualitas-Tenaga-Kerja-RI-Rendah>. diakses pada 2 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-38)
39. “USAID PRIORITAS, Tingkatkan Akses Pendidikan Dasar” dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2015/11/01/348220/usaid-prioritas-tingkatkan-akses-pendidikan-dasar> diakses pada 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-39)
40. “Selamat Datang di USAID PRIORITAS” dalam <http://www.prioritaspendidikan.org/id/post/view/detail/1> diakses pada 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-40)